

KEKETUAAN INDONESIA DI ASEAN DAN KEPENTINGAN NASIONAL YANG PERLU DIPERJUANGKAN

Simela Victor Muhamad

Abstrak

Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 memiliki arti strategis karena dengan posisinya itu Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan nasional yang sejalan dengan kepentingan kawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan membahas tiga permasalahan yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN. Permasalahan tersebut mencakup isu pemulihan ekonomi nasional dan kawasan, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), dan stabilitas kawasan. Keberhasilan dalam pemulihan ekonomi nasional dan pencapaian SDGs di masing-masing negara ASEAN, serta terciptanya stabilitas kawasan, merupakan pijakan penting bagi ASEAN untuk berkembang menjadi kawasan yang kuat, inklusif, dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keketuaan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2023, yang juga dipegang oleh Indonesia (DPR RI), juga harus diarahkan untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional Indonesia yang sejalan dengan kepentingan kawasan. Menjadi kepentingan masyarakat ASEAN, termasuk anggota parlemen, untuk menyukseskan Keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA pada tahun 2023.

Pendahuluan

Pada 11 Januari 2023, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Retno LP Marsudi, memaparkan prioritas kebijakan luar negeri RI 2023 yang menurutnya masih akan dihadapkan pada situasi geopolitik yang sangat dinamis dan ketidakpastian global. Tantangan global diakui Menlu Retno semakin berat. Meski demikian, dengan cara pandang positif, kerja sama, dan

paradigma kolaborasi, Menlu yakin Indonesia akan terus berkontribusi dan memainkan kepemimpinannya dalam diplomasi di panggung global (Kompas, 12 Januari 2023). Setelah dinilai sukses menjalankan Keketuaan G20 pada 2022, Indonesia akan memfokuskan diplomasi pada 2023 dengan menjadi Ketua ASEAN.

Keketuaan ASEAN bagi Indonesia yang mulai berlaku dari tanggal 1 Januari sampai



dengan 31 Desember 2023 tidak sekedar meneruskan tongkat estafet Keketuaan ASEAN dari Kamboja ke Indonesia. Keketuaan (*Chairmanship*) ASEAN yang dipegang oleh Indonesia tersebut memiliki arti strategis, karena dengan posisinya itu Indonesia menjadi leader dan dapat mengambil peran penting dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi ASEAN dan juga dalam memajukan kawasan, termasuk memanfaatkan Keketuaan Indonesia di ASEAN untuk memperjuangkan kepentingan nasional (Jakarta Post, 20 Januari 2023).

Sejalan dengan tema ASEAN *Matters: Epicentrum of Growth* dan situasi geopolitik yang sangat dinamis, Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 akan berfokus pada penguatan ekonomi kawasan yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan serta dapat bertransformasi menjadi kawasan yang berkomitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan (kemlu.go.id., 12 Januari 2023). Indonesia juga akan memperkuat implementasi ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang inklusif untuk kawasan yang damai, saling terhubung, inklusif, dan kompetitif (Jakarta Post, 17 Januari 2023). Sehubungan dengan hal tersebut, dan juga untuk membatasi permasalahan yang dibahas, tulisan singkat ini membahas tiga permasalahan yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN. Permasalahan tersebut mencakup isu pemulihan ekonomi nasional dan kawasan, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*), dan stabilitas kawasan.

Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kawasan

Pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 merupakan isu penting yang perlu diperjuangkan dan menjadi kepentingan nasional Indonesia, dan juga kepentingan ASEAN. Oleh karena itu, Keketuaan Indonesia di ASEAN harus memberi perhatian terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional dan juga ekonomi kawasan. Sebagaimana diketahui, ASEAN merupakan salah satu kawasan di dunia yang memiliki populasi penduduk cukup besar, yaitu lebih kurang 663,9 juta penduduk atau hampir 9% dari jumlah penduduk dunia. Hampir setengah dari populasi ASEAN berumur di bawah 30 tahun. Populasi ASEAN berada pada urutan ke-3 setelah China (1.425,9 juta) dan India (1.407,6 juta) (ekon.go.id., 5 Januari 2023).

Fakta tersebut menjadikan ASEAN sebagai salah satu pasar internasional yang potensial dalam perdagangan internasional dan dapat menjadi aspek penting dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dan membangun ketahanan ekonomi kawasan. Oleh karena itu, Indonesia dalam posisinya sebagai Ketua ASEAN 2023 sudah seharusnya menjalankan peran penting dan memanfaatkan momentum ini untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan terwujudnya ketahanan ekonomi kawasan. Dalam kerangka pemulihan ekonomi, tiga isu prioritas bidang ekonomi yang mencakup *recovery and rebuilding*, *digital economy*, dan *sustainability* harus dapat diimplementasikan selama tahun 2023.

Ini artinya, Keketuaan Indonesia di ASEAN harus memberi kontribusi bagi upaya pemulihan ekonomi nasional negara-negara ASEAN dan

juga kawasan. Keketuaan Indonesia di ASEAN harus diarahkan pada upaya penanganan krisis multidimensi, seperti krisis pangan, energi, dan keuangan, dengan tujuan jangka panjang untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia. Hal tersebut sejalan dengan kerangka kerja pemulihan ekonomi ASEAN (ASEAN *Comprehensive Recovery Framework*), kesepakatan yang dicapai pemimpin ASEAN pada KTT ke-36 ASEAN tahun 2020, untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

Pencapaian SDGs

Isu penting lainnya yang perlu terus diperjuangkan dan juga menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia adalah mengupayakan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Menurut *Sustainable Development Report 2022* (dashboards.sdgindex.org), saat ini Indonesia sudah berhasil mencapai 69,16% dari seluruh tujuan SDGs. Pencapaian itu meningkat dibanding tahun 2015 yang skornya masih 65,03%. Namun, sampai 2022 Indonesia masih mendapat label 'merah' atau dinilai memiliki tantangan besar dalam penanganan masalah kelaparan, kesehatan, keberlanjutan kota, pelestarian ekosistem laut dan daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan, serta kemitraan global. Pada tahun 2022, pencapaian SDGs Indonesia berada di peringkat ke-82 dari 163 negara. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-5.

Dengan masih adanya tantangan besar Indonesia dalam upaya pencapaian SDGs, maka posisi strategis Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperjuangkan

pencapaian SDGs. Indonesia, melalui Keketuannya di ASEAN harus menggalang solidaritas dan memperkuat kemitraan di antara negara-negara ASEAN dalam upaya pencapaian SDGs. Di tingkat nasional, sebagaimana diketahui pada tanggal 13 September 2022 telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan telah ditetapkannya Perpres No. 111 Tahun 2022, diharapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional dapat tercapai dengan lebih cepat dan lebih terarah sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Terkait pencapaian SDGs, parlemen perlu dilibatkan dalam menyusun kebijakan yang mendukung percepatan pencapaian SDGs. Upaya negara-negara ASEAN dalam mempercepat pencapaian SDGs perlu ditopang oleh parlemen melalui fungsi konstitusionalnya di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pandemi Covid-19 telah menghambat pencapaian SDGs di berbagai bidang seperti penghapusan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran dan ketimpangan, pertumbuhan ekonomi hingga penanganan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, penguatan komitmen dan langkah bersama negara-negara ASEAN untuk mempercepat pencapaian SDGs sangat esensial dan mendesak. Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, bersama parlemen nasional negara-negara ASEAN, harus ikut mengawal dan memastikan komitmen pencapaian SDGs 2030 dapat dilaksanakan dengan baik di negara-negara ASEAN.

Stabilitas Kawasan

Indonesia juga berkepentingan dengan terciptanya stabilitas kawasan sebagai prasyarat bagi negara-negara ASEAN dapat melaksanakan program pembangunan nasionalnya secara berkelanjutan tanpa gangguan keamanan di kawasan. Sengketa teritorial di Laut China Selatan, yang melibatkan China dan sejumlah negara ASEAN (Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina) serta Taiwan, yang hingga kini belum berhasil dicapai solusi damainya masih menjadi potensi ancaman bagi stabilitas kawasan, terlebih ketika para pihak yang bersengketa lebih memilih menggunakan kekuatan militer dalam mengamankan teritorialnya di Laut China Selatan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik terbuka dan dapat berimplikasi pada terganggunya stabilitas kawasan.

Meskipun bukan negara pihak yang bersengketa, Indonesia tidak boleh mengabaikan isu sengketa teritorial yang terjadi di Laut China Selatan. Dalam kerangka untuk mencegah terjadinya konflik terbuka dan untuk mewujudkan terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan, sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia harus terus menyuarkan pentingnya penyelesaian sengketa teritorial di Laut China Selatan secara damai melalui perundingan dan dengan pendekatan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*). Sementara

itu, dalam kerangka menjaga stabilitas keamanan di perairan Laut China Selatan, melalui Keketuaan Indonesia di ASEAN, penyusunan *Code of Conduct* (CoC) sebagai landasan operasional kawasan maritim yang damai di Laut China Selatan diharapkan dapat dicapai dan disepakati oleh ASEAN dan China pada tahun 2023 (The Jakarta Post, 25 Januari 2023).

Masih dalam kerangka upaya mewujudkan stabilitas kawasan, Indonesia juga berkepentingan untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di Myanmar. Bukan tidak mungkin, apabila krisis yang terjadi di Myanmar tidak teratasi dan berkelanjutan, hal tersebut berpotensi mengganggu dan mengancam stabilitas kawasan. Oleh karena itu, di bawah Keketuaan Indonesia, ASEAN perlu untuk terus mengupayakan dan mengambil langkah yang lebih progresif dalam mengatasi krisis yang terjadi di Myanmar. Upaya tersebut sudah tentu dilakukan secara damai, terutama melalui pelaksanaan Lima Poin Konsensus (*Five-Point Consensus*) ASEAN untuk perdamaian di Myanmar.

Lima Poin Konsensus untuk perdamaian di Myanmar yang disepakati pemimpin ASEAN (asean.org., 11 November 2022), mencakup: *pertama*, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya; *kedua*, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat; *ketiga*, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal

ASEAN; *keempat*, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre (*The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management*); *kelima*, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait. Dalam kerangka penyelesaian damai di Myanmar, parlemen dapat mengambil peran karena memiliki posisi strategis sebagai *peacemaker* dan *bridge builder*, sesuai kapasitas dan mandat politik yang dimiliki, untuk berkontribusi dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.

Penutup

Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 memiliki arti strategis karena dengan posisinya itu Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan nasional yang pada dasarnya sejalan dengan kepentingan kawasan. Pemulihan ekonomi nasional dan pencapaian SDGs negara-negara ASEAN, serta stabilitas kawasan, penting untuk diperjuangkan dan terus diupayakan oleh Indonesia sebagai Ketua ASEAN. Keberhasilan dalam pemulihan ekonomi nasional dan pencapaian SDGs di masing-masing negara ASEAN, serta terciptanya stabilitas kawasan, merupakan pijakan penting bagi ASEAN untuk berkembang menjadi kawasan yang kuat, inklusif, dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Posisi Keketuaan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2023, yang dipegang oleh Indonesia (DPR RI), juga harus diarahkan untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional

Indonesia yang sejalan dengan kepentingan kawasan. Keketuaan Indonesia di AIPA, melalui berbagai rangkaian aktivitas pertemuannya pada tahun 2023, harus berkontribusi pada upaya pencarian solusi atas berbagai permasalahan internasional di kawasan, baik yang berkaitan dengan isu politik dan keamanan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Menjadi kepentingan bersama bagi masyarakat ASEAN, termasuk anggota parlemen negara-negara ASEAN, untuk menyukseskan Keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA pada tahun 2023

Referensi

“ASEAN Leaders’ Review and Decision on the Implementation of the Five-Point Consensus”, [asean.org.](https://asean.org/), 11 November 2022, <https://asean.org/asean-leaders-review-and-decision-on-the-implementation-of-the-five-point-consensus/>, diakses 25 Januari 2023.

“Genggam Chairmanship ASEAN 2023, Indonesia Siap Jadikan ASEAN Jangkar Stabilitas Perekonomian Global”, [ekon.go.id.](https://www.ekon.go.id/), 5 Januari 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4843/genggam-chairmanship-asean-2023-indonesia-siap-jadikan-asean-jangkar-stabilitas-perekonomian-global>, diakses 25 Januari 2023.

“Indonesia’s ASEAN Presidency to Focus on Economic Growth: Minister”, [thejakartapost.com.](https://www.thejakartapost.com/), 20 Januari 2023, <https://www.thejakartapost.com/world/2023/01/20/indonesias-asean-presidency-to-focus-on-economic-growth-minister.html>, diakses 25 Januari 2023.

“Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023”, kemlu.go.id., 12 Januari 2023, <https://www.kemlu.go.id/paris/id/news/22732/keketuaan-indonesia-di-asean-tahun-2023>, diakses 22 Januari 2023.

“Prioritas Politik Luar Negeri 2023”, *Kompas*, 12 Januari 2023, hal. 1 dan 15.

Sustainable Development Report 2022, [dashboard.sdgindex.org.](https://dashboard.sdgindex.org/), diakses 22 Januari 2023.

“Time to Ramp Up ASEAN’s Indo-Pacific Strategy”, *thejakartapost.com.*, 17 Januari 2023, <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/01/17/time-to-ramp-up-aseans-indo-pacific-strategy.html>, diakses 25 Januari 2023.

“Quiet Ingenuity Needed ‘Needed’ to Move Needle on COC”, *The Jakarta Post*, 25 Januari 2023, hal. 4.



Simela Victor Muhamad
simela.muhamad@dpr.go.id

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. adalah Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Isu-Isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI, yang bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya” (bagian dari buku *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2017); “Isu Keamanan Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen.” (artikel di *Jurnal Politica* Vol 7 No. 1, Mei 2016); “Peran *Asian Parliamentary Assembly* dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel” (artikel di *Jurnal Politica*, Vol. 8 No. 1, Mei 2017); “Indonesia dan Kerja Sama Internasional Penanggulangan Terorisme di Kawasan” (bagian dari buku *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2018); dan “*Proxy War* dalam Konflik di Lebanon” (bagian dari buku *Proxy War* di Timur Tengah, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.